

MONITOR BERITA

1

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
--	---

KODE : LISTRIK PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 MIGAS UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 HALAMAN: 5 TAHUN 2004

'PT Kassa Listrindo agar bangun PLTU Takalar'

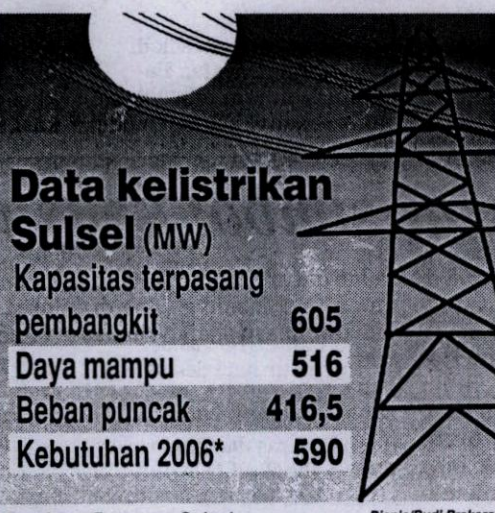
MAKASSAR (Bisnis): PT PLN Wilayah VIII Sulselra meminta manajemen PT Kassa Listrindo untuk segera memulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Takalar. Sebab jika tidak, PLN akan mencari calon investor lain yang lebih serius untuk membangun pembangkit.

"Sebenarnya banyak penawaran [dari investor lain], tetapi kita sudah komitmen dengan satu investor dulu karena pasokan listrik juga harus diatur agar tidak berlebihan," katanya, kemarin kata *General Manager* PT PLN Wilayah VIII Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra), Rachmadi Danoe Atmadja di Makassar, pekan ini.

Menurut dia, hingga kini belum ada kepastian pembangunan pembangkit listrik baru di Sulsel, sementara pada 2006 diperkirakan terjadi krisis energi listrik.

Dia menambahkan kendati sejumlah calon investor telah menyatakan niatnya membangun pembangkit listrik di daerah ini, namun sejauh ini belum ada yang membuat ikatan dengan PLN, sehingga tidak ada kepastian pelaksanaan investasi pembangkit tersebut.

"Dari sekian investor yang telah menyatakan niatnya hanya PT Kassa Listrindo



Sumber: Pemprov Sulsel
Ket. * Pertumbuhan 11%

Bisnis/Budi Prakarsa

(calon investor PLTU Takalar) yang probabilitasnya paling tinggi," katanya.

Hanya saja, menurut dia, PT Kassa Listrindo baru mengajukan penawaran harga jual listrik ke PLN, dan memberikan gambaran tentang jadwal pasokan serta kualitas produksi tenaga listriknya.

Sementara investor lain seperti Nippon Koei Co Ltd (PLTA Malea, Kab. Tana Toraja), PT Bukaka Teknik Utama (calon investor Bakaru II) serta Bosowa Group yang berencana membangun PLTU di Jeneponto, baru sebatas rencana.

Padahal, papa Rachmadi, setiap rencana investasi pembangkit di didahului dengan membuat ikatan jual beli listrik dengan PLN.

Perlu kepastian

Karena itu, dia menegas-

kan PLN tidak akan melakukan satu ikatan sebelum ada gambaran dari calon investor mengenai harga, kepastian jadwal suplai, dan kualitas tenaga listrik yang dihasilkan.

Dia menambahkan khusus untuk penawaran harga yang diajukan PT Kassa Listrindo, saat ini sedang diproses oleh Direksi PT PLN dan diharapkan akan ada persetujuan pada bulan ini.

"Begitu persetujuan keluar, saya minta kepada PT Kassa Listrindo untuk segera memulai pembebasan tanah sebab terus terang kita tidak bisa menunggu untuk menghindari defisit listrik pada 2006," katanya.

Dia menjelaskan PT Kassa Listrindo berencana akan membangun PLTU di Takalar, Sulsel berkapasitas 60 MW dengan investasi sekitar US\$60 juta. Pembangunan PLTU tersebut, lanjutnya, dapat menjamin pasokan kebutuhan tenaga listrik di Sulsel beberapa tahun ke depan.

Dia menambahkan calon investor lain seperti PT Bukaka Teknik Utama yang mau memanfaatkan aset PLN di Bakaru kemungkinan sulit merealisasikan rencananya itu, sementara Nippon Koei Co Ltd belum pernah mengajukan penawaran harga kepada PLN. (k5)

1

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/> "
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1/1	

TAHUN 2004

Dua PLTG Jambi Rusak

PEMADAMAN listrik di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Muaro Jambi hingga Kamis (4/3) masih terus berlanjut akibat kerusakan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) milik PT PLN Jambi. Kerusakan PLTG tersebut disebabkan hujan deras yang disertai petir sejak Selasa siang hingga Rabu.

Satu unit PLTG rusak disambar petir hari Selasa dan satu lagi rusak karena sebagian kabelnya putus akibat hujan deras dan angin kencang. Pihak PLN belum memastikan, kapan selainya perbaikan dua pembangkit listrik tersebut.

Sementara itu, Manajer PT PLN Cabang Jambi, Ir Efris Meizon, kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu (3/3) menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan selainya kedua perbaikan PLTG tersebut, sampai saat ini masih dilakukan perbaikan. Karena itu belum dipastikan mengenai penghentian pemadaman listrik di tiga daerah tersebut.

Disebutkan saat ini PT PLN Jambi hanya mampu memasok 23 Megawatt daya listrik dari dua PLTD ditambah 9 megawatt dari Sumatera Barat. Sedangkan beban puncak di tiga daerah tersebut mencapai 60 megawatt.

Sementara itu warga masyarakat kota Jambi sangat menyesalkan kelambanan PT PLN Jambi menangani kerusakan PLTG tersebut. (141)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 28 TAHUN 2004

LSM Tolak Pembangunan PLTN Jepara, Madura

JAKARTA (Media): Rencana pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), baik di Gunung Muria, Jepara, Jawa Tengah, maupun di Sampang, Madura, harus ditolak. Sebab, dapat berdampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, tidak ada transparansi informasi sama sekali terhadap masalah itu.

Demikian pernyataan sikap dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng dan Jatim serta Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANI) dan Aliansi Masyarakat Madura Pemerhati Nuklir (AM2PN) mengenai rencana pembangunan dua PLTN itu.

Keempat organisasi nonpemerintah (ornop) tersebut mengingatkan tingkat bahaya pembuangan limbah radioaktif selama ribuan tahun atas keamanan

reaktor yang hanya berumur 30-50 tahun. Karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penelitian dan penggunaan energi alternatif aman, bersih dan ramah lingkungan untuk mencegah di-bangunnya PLTN. Hal ini mengingat ketersediaan sumber daya alam di Indonesia masih cukup besar.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah Adi Nugroho mengingatkan tentang bencana ledakan dan radiasi yang bisa ditimbulkan akibat pembangunan PLTN yang menggunakan reaktor nuklir tersebut, seperti yang pernah terjadi di Chernobyl, Uni Soviet, beberapa tahun lalu. "Dampak limbah nuklir itu akan membahayakan masyarakat sekitar hingga waktu yang sangat lama," ucap Adi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Korean Hydro Nuclear Power (KHNP) Co Ltd, yang diajak bekerja sama oleh Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) dalam rencana pembangunan PLTN Muria itu pun ternyata telah banyak membuat kasus kebocoran dari 16 reaktor nuklir yang dimilikinya.

Dalam kesempatan yang sama, Mutmainah dari AM2PN mengatakan hingga kini tidak ada penjelasan sama sekali atas dampak radiasi dampak limbah radioaktif akibat dibangunnya PLTN Madura. Menurutnya, sosialisasi PLTN Madura yang dilakukan Batan bersama Lembaga Penelitian Masyarakat Universitas Brawijaya serta empat perguruan tinggi di Madura lebih banyak menyampaikan manfaat nuklir dan menutupi bahaya PLTN.

Diungkapkannya, pada 10 Oktober 2001 Batan bersama KAE-RI (Korean Atomic Energy Research Institute) telah menandatangani *memorandum of understanding (MoU)* sebesar US\$200 juta untuk *feasibility study* rencana pembangunan PLTN Madura 2008 yang diharapkan beroperasi pada 2015.

Keempat ornop itu berencana menemui mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Komisi VIII DPR mengenai penolakan rencana PLTN itu. Menurut Yahdillah dari MANI, Gus Dur diharapkan dapat mendukung penolakan pembangunan PLTN itu. "Dulu sebelum jadi presiden, Gus Dur sempat datang ke Jepara dan bilang kalau sampai PLTN itu dibangun dia akan puasa di sana." (Nuz/S-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 5											TAHUN 2004																																	

PLN Samarinda tekan kerugian

SAMARINDA (Bisnis): PLN Cabang Samarinda menargetkan kerugian selama 2004 hanya Rp1,5 miliar atau menurun Rp89,9 mília dibanding kerugian 2003 sebanyak Rp91,4 miliar.

Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan PT PLN Cabang Samarinda, Purwoko, mengatakan besarnya penurunan tingkat kerugian itu merupakan salah satu dampak dari kenaikan tarif listrik tahap ketiga September 2003.

"Menurunnya tingkat kerugian PLN Samarinda itu diharapkan mampu mencapai target nasional yang menginginkan setelah 2004 bisa *break event point* (BEP)," katanya, kemarin.

Menurut dia, guna mencapai target tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan PLN Samarinda, yakni menertibkan pemakaian daya listrik oleh pelanggan untuk memperkecil tingkat pencurian listrik. (k11)

4

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 21

TAHUN 2004

Panasnya Bumi di Kawah Darajat

WILAYAH Jawa Barat sangat kaya dengan potensi panas buminya. Hingga saat ini terdapat tiga daerah sumber panas bumi yang dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yaitu Kamojang, Karaha Bodas, dan Kawah Darajat. Listrik yang diproduksi dengan panas bumi adalah energi ramah lingkungan dan sekaligus energi terbaru. Prosesnya sendiri merupakan proses emisi rendah yang secara alami menggunakan uap dari daerah vulkanik untuk membangkitkan listrik.

Energi panas bumi adalah sumber energi yang akan menikmati penghasilan tambahan dari penghasilan *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk *Certified Emission Reduction*. Penghasilan dari CDM inilah yang menciptakan daya tarik investor untuk mengembangkan dan meneruskan proyek ini secara ekonomis.

PLTP Kawah Darajat dikelola oleh Amoseas Indonesia Inc.

Amoseas adalah salah satu anak perusahaan dari ChevronTexaco yang kini juga merupakan induk dari PT Caltex Pasific Indonesia (CPI). Amoseas berhasil memenangkan proyek panas bumi Darajat lewat tender terbuka, dan menjadi pionir dalam proyek panas bumi yang ditan-datangani tahun 1984. Pada saat itu, Amoseas bermitra dengan PT Pertamina dalam *joint operation contract* (JOC) dan PT PLN dalam kontrak *energy sales contract*.

Saat ini Amoseas mengoperasikan proyek pembangkit Darajat I yang menghasilkan 55 MW mulai beroperasi November 1994, yang dioperasikan oleh PLN, sepenuhnya menggunakan uap hasil panas bumi dari ladang panas bumi Amoseas. Sedangkan Pembangkit Darajat II dibangun dan dioperasikan oleh Amoseas sejak 2000 dan memproduksi lebih dari 90 MW.

Amoseas saat ini sedang mengevaluasi perluasan proyek

panas bumi ini dengan merencanakan pembangunan pembangkit baru dengan kapasitas yang direncanakan 100 MW yang dinamakan Darajat III. Mereka bermitra dengan PT Darajat Geothermal Indonesia (PT DGI) dalam pengembangan proyek PLTP Darajat tersebut.

Keberadaan serta rencana pengembangan ini justru mendapatkan tentangan dari pemerintah daerah yang merasa ter-sisihkan selama ini. Dilatarbelakangi oleh sangat minimnya PAD Garut tiap tahunnya, Pemkab Garut terus berusaha agar mereka dilibatkan terutama dalam pertimbangan keuntungannya. "Kita yang punya daerah, kerusakan lingkungan pun kita yang tanggung, tetapi kita tak dapatkan sepeser pun dari mereka kecuali PBB dan PPh. Panas bumi PT Amoseas sama sekali belum terasa panasnya di Kabupaten Garut," tutur Ketua DPRD Garut, Drs. Ir. Iyos Somantri. (Deni/PR)***

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- MERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- ..

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 22

TAHUN 2004

Pemkab Garut Desak "Judicial Review"

GARUT, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Garut akan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan *judicial review* terhadap UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Terutama Pasal 41 tentang pembayaran royalti sumber daya panas bumi, yang dinilai merugikan pemerintah daerah.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP), Sjamsu S. Djajusman M.E., di Garut, Selasa (2/3). Menurutnya, dengan masih berlakunya UU Nomor 27/2003 tentang Panas Bumi tersebut, maka hak daerah penghasil tak didapatkan. Desakan ini didasari oleh tak jelasnya kontribusi PT Amoseas terhadap daerah Garut selama ini. "Walaupun PT Amoseas meraup untung dari hasil penjualan listrik dan uap kepada PLN dan *Indonesia Power* sebesar Rp 281 miliar lebih, hingga kini Kabupaten Garut yang memunyai wilayah tak mendapatkan sepeser pun dari mereka, selain pembayaran PBB dan PPh pegawai untuk kas daerah," tandas Sjamsu.

Isi dari UU Nomor 27/2003 Pasal 41 berbunyi "Semua kontrak kerja sama pengusaha sumber daya panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa kontrak".

Menurut Sjamsu, PT Amoseas selalu berlindung di balik UU tersebut karena dalam kontrak yang dulu tak ada kewajiban mereka sebelum tercapai *break even point*. Selain itu, menurutnya, UU tersebut juga sebenarnya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 A ayat (2).

Selama ini, pihak Amoseas selalu mengatakan bahwa mereka masih merugi sebesar 74 juta dolar AS. Hal ini membuat Kab. Garut tak berdaya karena diperkirakan kerugian ini akan tertutup setelah 20 tahun saat *break even point* tercapai. "Pemkab Garut bukannya tak mau memahami arti *break even point* yang belum tercapai, tapi adilnya setiap tahun Garut mendapatkan royalti atau bagian iuran produksi, walau *break even point*-nya baru tercapai 20 tahun mendatang, misalnya," tukas Sjamsu.

Dijelaskan, sesungguhnya Pemkab Garut telah berupaya untuk memberi masukan selama proses penajaman RUU Panas Bumi. Aspirasi masyarakat Garut terakomodasi dalam Pasal 30 ayat (5) UU yang sama yang mengatur tentang hak daerah penghasil sebesar 32% dari iuran produksi.

Pada Jumat (27/2), PT Amoseas telah mengadakan *ekspose* di hadapan jajaran pejabat Pemkab Garut di Pamengkang Pendopo Kabupaten Garut. Tetapi, belum ada kata sepakat yang didapat pada pertemuan itu. Dikatakan Sjamsu, pihaknya saat ini tengah menyusun jadwal untuk melakukan pertemuan kembali dengan PT Amoseas, untuk meninjau kembali kontrak lama yang telah dibuat.

Berdasarkan keterangan Wakil Bupati Garut, Memo Hermawan saat itu, Pemkab Garut tetap menginginkan adanya pelibatan terhadap setiap proses perkembangan di PT Amoseas. Begitu pun dengan pendapat Ketua DPRD Garut, Drs. Ir. Iyos Somantri juga mengemukakan kompensasi penggunaan lahan hutan lindung, realisasi dari upaya *com-*

munity development (CD), serta masalah-masalah lain yang terkait dengan berdirinya PT Amoseas di Kawah Darajat yang memproduksi listrik sebesar 95 MW per tahunnya itu.

Keluarkan 1 juta dolar AS

Sedangkan menurut Ir. Riki F. Ibrahim M.Sc., *Government Affairs* PT Amoseas Indonesia, pihaknya selama ini telah melakukan upaya CD sejak berproduksi mulai 2000 dengan total anggaran yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut sebanyak hampir 1 juta dolar AS.

"Kita memunyai komitmen untuk warga di sekitar lokasi dan sumbangan tersebut untuk CD yang dilakukan melalui suatu proses yaitu melalui BPD di daerah, kecamatan yang terdekat yaitu Pasirwangi. Dalam koordinasinya, kita juga bekerja sama dengan Bappeda Garut untuk menentukan seperti apa jenis pembagiannya," jelas Ricky.

Begitupun dengan pihak Departemen Keuangan yang hadir saat itu menyatakan, bahwa hingga saat ini PT Amoseas sama sekali belum memunyai untung hingga belum dapat memberi kontribusi kepada daerah Garut. Selain itu, perangkat perundangan yang membahas tentang perimbangan keuntungan itu hingga kini belum ada.

Riki hanya berharap agar pihak Pemkab Garut tak membalikkan semua permasalahan pada pihaknya, karena saat ini mereka tengah melakukan rancangan untuk pembangunan Darajat III. Menurutnya, dengan berkembangnya isu yang bernada sumbang itu justru akan membuat investor takut untuk berinvestasi di

Garut. (A-124)